

SKRIPSI

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN
KELARA**



OLEH:

SALMAWATI

E051201006

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN

KELARA

Yang disusun dan diajukan oleh:

Salmawati

E051201006

Yang telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

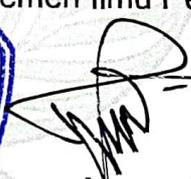
Mengetahui

Pembimbing

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan


Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si
NIP. 195708181984031002




Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si
NIP. 197901062005011001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN

KELARA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SALMAWATI

E051201006

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024

Menyetujui:

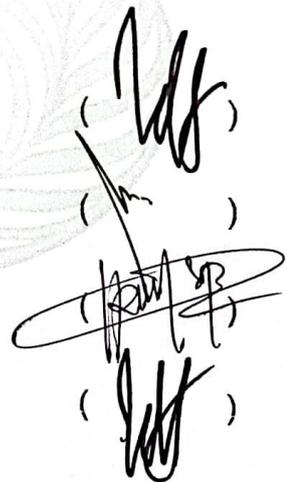
PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si

Anggota : Ashar Prawitno, S.IP., M.Si

Anggota : Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si

Pembimbing : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si



Handwritten signatures of the examination committee members, including the Chairman and members, with their names in parentheses next to the signatures.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmawati

NIM : E051201006

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul:

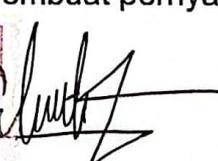
**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN
KELARA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Salmawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kelara”** yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan. Akan tetapi, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi M.Si selaku Pembimbing yang selalu mendorong, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
8. Seluruh informan penelitian yang terlibat yakni Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kelara, Ketua Kelompok Tani dan masyarakat petani di Kecamatan Kelara yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Orang tua penulis, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Marlina sosok tiada duanya dan paling hebat di dunia yang berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendoakan, serta memberi nasehat, semangat, motivasi dan dorongan baik itu secara moral maupun materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Tetta dan Mama selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kakak penulis, Saharuddin yang sudah menjadi pendorong sekaligus penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Tante Bau yang sudah menjadi orang tua kedua bagi penulis. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang tak hentinya diberikan kepada penulis selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tiada hentinya.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
13. Saudara-saudari seperjuangan Maintiendrai 2020 (Dadang, Ricky, Rifky, Lucky, Ambar, Zacky, Fiqri, Hanafi, Adnan, Ariman, Agum, Wisnu, Andis, Aurel, Billy, Selvi, Mala, Pute, Rara, Naftha, Muthe, lin dan Pitti) yang telah menemani hari-hari penulis selama perkuliahan. Terima kasih atas segala kisah suka dan duka yang telah dilalui bersama. Semoga pertemanan ini abadi selamanya.

14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Himapem FISIP Unhas) yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran kepada penulis dalam menempuh dunia perkuliahan.
15. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman KKNT Pengembangan Desa Wisata Pangkep Gelombang 110 Posko Balleangin Mantap (Inna, Nisa, Widi, Srimul, Ikka, Manja, Dea, Ryan, Haekal, Al, Silves dan Rustam) yang menjadi teman sekaligus saudara yang menyenangkan selama KKN berlangsung. Terima kasih atas segala support yang diberikan kepada penulis.
17. Teman-teman Tim Kampus Mengajar Angkatan 6 (Aulia, Rini, Icha dan Asti) yang telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
18. Teman-teman Komunitas Koin Untuk Negeri (KUN) Makassar yang telah memberikan tempat pelepas jenuh dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

19. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Pelajar Turatea (HPMT) Komisariat Unhas yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
20. Kepada sahabat penulis, Heni Indrayani yang selalu memberikan semangat, menemani suka maupun duka dan senantiasa sabar mendengar keluh kesah penulis. Semoga bahagia selalu Bebo.
21. Kepada saudari seperjuangan, Andi Siti Nursiana yang sudah menjadi partner terbaik penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi dan ikut andil dalam perjuangan penulis dari proses perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perjuangan bersama selama ini hingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Semoga pertemanan ini kekal abadi.
22. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh dan sekuat ini. Meski banyak hambatan dan rintangan tapi selalu ada orang-orang yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan. Banyak hal yang penulis lewati sampai saat ini, akan tetapi penulis mampu melewatinya dengan baik walau disertai dengan keluhan. Penulis sangat bangga kepada diri sendiri ini karena sanggup dan tangguh untuk berada sampai di titik ini. *I did it.*
23. Terakhir, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam teknik penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah lainnya di kemudian hari. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin

Makassar, 7 Juli 2024

Salmawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Strategi.....	10
2.2 Peran Pemerintah	11
2.2.1 Peran Pemerintah	11
2.2.2 Pemerintah Daerah.....	16

2.3 Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	22
2.4 Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	28
2.5 Petani.....	36
2.6 Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Informan Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Sumber Data	44
3.6 Fokus Penelitian.....	45
3.7 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto.....	50
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kelara	66
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto	72
4.2 Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Petani di Kecamatan Kelara.....	85
4.2.1 Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian	85
4.2.2 Harga Komoditas Pertanian	105
4.3 Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kelara.....	112

4.3.1 Pendidikan dan Pelatihan	112
4.3.2 Penyuluhan dan Pendampingan	122
4.3.3 Penguatan Kelembagaan Petani	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.....	57
Tabel 4.3 Data Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 ..	65
Tabel 4.4 Luas Wilayah Kecamatan Kelara Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2022	68
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kelara Tahun 2022	69
Tabel 4.6 Penduduk Kecamatan Kelara Menurut Desa/Kelurahan dan Sumber Mata Pencaharian Tahun 2022.....	69
Tabel 4.7 Luas Lahan Menurut Desa/Kelurahan dan Penggunaannya di Kecamatan Kelara (Ha) Tahun 2022	71
Tabel 4.8 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Bahan Makanan di Kecamatan Kelara Tahun 2022...	72
Tabel 4.9 Rekapitan Jalan Usaha Tani (JUT) Kabupaten Jeneponto 2022- 2024	88
Tabel 4.10 Rekapitan Penyaluran Pompa Air 3 Inchi Kabupaten Jeneponto Tahun 2024	96
Tabel 4.11 Rekapitan Penyaluran Traktor Roda 2 Kabupaten Jeneponto Tahun 2024	96

Tabel 4.12 Realisasi Penyaluran Bantuan Padi Kabupaten Jeneponto	
Tahun 2023	97
Tabel 4.13 Realisasi Penyaluran Bantuan Jagung Kabupaten Jeneponto	
Tahun 2023	99
Tabel 4.14 Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian BPP Kec. Kelara	
Kab. Jeneponto Tahun 2023	118
Tabel 4.15 Tim Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan	
Kelara.....	128
Tabel 4.16 Penilaian Kelompok Tani berdasarkan kemampuan Kelompok	
Tani WKBPP Kelara Tahun 2023.....	134
Tabel 4.17 Jumlah Kelembagaan Penyuluh Pertanian WKBPP Kecamatan	
Kelara Tahun 2023	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto	55
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	67
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto	84
Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kelara	127

ABSTRAK

Salmawati, Nomor Induk Mahasiswa E051201006, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul: **“Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kelara”**, di bawah bimbingan Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) strategi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan petani di Kecamatan Kelara; (2) strategi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Petani guna meningkatkan kesejahteraan Petani di Kecamatan Kelara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan/studi literatur dan dokumentasi. Lalu, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perlindungan pemerintah daerah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto di Kecamatan Kelara dilakukan dengan menyediakan prasarana berupa jalan usaha tani dan jaringan irigasi. Lalu, sarana berupa penyaluran bantuan bibit padi dan jagung, pupuk bersubsidi serta alat dan mesin pertanian berupa pompa air dan hand traktor. Sementara harga komoditas pertanian kurang menguntungkan petani karena kualitas komoditas yang tidak sesuai standar mutu. Strategi pemberdayaan petani dengan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk sosialisasi tidak menjangkau keseluruhan petani. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan dengan memberikan arahan secara teknis terkait tata cara pengelolaan lahan dan tanaman dari penyuluh ke petani juga masih belum menjangkau keseluruhan petani. Penguatan kelembagaan petani dengan mengupayakan terjalinnya hubungan harmonis antar anggota Kelompok Tani dan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan petani melalui Kelompok Tani.

Kata Kunci: Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah, Kecamatan Kelara

ABSTRACT

Salmawati, E051201006 Student Identification Number, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, prepared a thesis titled: "**Analysis of Local Government Strategies in Protecting and Empowering Farmers in Kelara District**", under the guidance of Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

This study aims to find out: (1) the strategy of the Regional Government in providing protection for farmers in Kelara District; (2) the strategy of the Regional Government in empowering Farmers to improve the welfare of Farmers in Kelara District.

The research method used in this study is a qualitative approach. The location of this research is the Jeneponto Regency Agriculture Office. Meanwhile, the data collection techniques used are observation, interviews, literature studies/literature studies and documentation. Then, the types of data used are primary data and secondary data. Data analysis is used through the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study show that the local government protection strategy by the Jeneponto Regency Agriculture Office in Kelara District is carried out by providing infrastructure in the form of farming roads and irrigation networks. Then, facilities in the form of distributing rice and corn seeds, subsidized fertilizers and agricultural tools and machinery in the form of water pumps and hand tractors. Meanwhile, the price of agricultural commodities is less favorable to farmers because the quality of commodities is not in accordance with quality standards. The strategy of empowering farmers with education and training in the form of socialization does not reach all farmers. Counseling and assistance are carried out by providing technical directions related to land and plant management procedures from extension workers to farmers, but they still do not reach all farmers. Strengthening farmer institutions by seeking to establish harmonious relationships between members of farmer groups and fulfilling the rights and needs of farmers through farmer groups.

Keywords: *Farmer Protection, Farmer Empowerment, Local Government, Kelara District*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam amanat tersebut mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.

Pemerintah dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat salah satunya melalui pembangunan pertanian. Di Indonesia pembangunan pertanian merupakan salah satu dari bagian pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Menurut Krisnandi (2009) dalam Mario, dkk (2017, hlm 12) pembangunan pertanian ini memberikan pengaruh kepada masyarakat dan menjamin bahwa pembangunan yang menyeluruh itu melibatkan penduduk yang hidup dari hasil bertani dengan jumlah yang besar dari tahun ke tahun yang akan datang.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sektor pertanian,

sehingga pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peran sektor pertanian tersebut sebagai sumber ketahanan nasional, penghasil devisa negara, dan juga sebagai sumber pendapatan bagi para masyarakat tani serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dibanding tenaga kerja sektor lainnya.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah Indonesia juga menjadikan negara yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk dapat dikembangkan. Sektor pertanian merupakan faktor yang sangat strategis dan termasuk basis ekonomi masyarakat desa yang menguasai kebutuhan kehidupan di sektor pertanian dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting adanya pembangunan pertanian yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

Untuk dapat meningkatkan hasil pertanian berdasar potensi yang dimiliki daerah diperlukan dukungan dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada produsen produk pertanian terkait proses hingga pasca produksi hasil pertanian. Rendahnya hasil produksi pertanian serta kurang diperhatikannya pasca produksi diperkirakan menjadi kendala dalam meningkatkan hasil pertanian pada daerah-daerah. Peran aparaturnya tingkat daerah perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas atau kemampuan

pemahaman semenjak produksi hingga pasca produksi hasil pertanian. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian maka diperlukan pembinaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun tanpa harus menciptakan ketergantungan pada pemerintah. Untuk dapat mendorong kinerja sektor pertanian, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan atau kapasitas berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemberdayaan kepada masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya, pada sektor pertanian pemberdayaan mesti dilakukan pada masyarakat petani.

Petani adalah orang yang mengusahakan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung, atau sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha tani (Mardikanto, 1982). Menurut Hernanto, 1993 petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dalam bidang pertanian dalam arti luas, yang meliputi usaha tani pertanaman, peternakan perikanan dan pemungutan hasil hutan. Usaha tani

adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

Pemberdayaan masyarakat Indonesia khususnya petani harus menjadi perhatian lebih serius, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Upaya pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat dengan melaksanakan komitmen sesuai dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, risiko harga serta merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani. Pada undang-undang tersebut, usaha pemerintah dalam melindungi petani melalui upaya dalam menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana produksi seperti jaringan irigasi, pupuk, alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal pemberdayaan, pemerintah menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani yang kegiatannya memfasilitasi petani untuk memperoleh dan menggunakan sarana produksi pertanian yang disediakan oleh pemerintah dengan baik.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada petani dari resiko pertanian yang sering terjadi, menjamin ketersediaan sarana prasarana pertanian, mengembangkan mutu kemampuan dan keterampilan petani dalam mengembangkan usaha para petani di sektor pertanian.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Jeneponto terletak berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah

Selatan. Kabupaten Jeneponto meliputi 11 Kecamatan, yakni Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang dan Turatea. Kondisi tanaman pangan di Jeneponto didukung dengan lahan sawah yang ada di beberapa kecamatan dan tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan yang banyak juga dihasilkan di Kabupaten Jeneponto. Sementara itu, dilihat dari jenis pengairan di Jeneponto, irigasi sederhana dan tadah hujan masih menjadi pilihan utama.

Kecamatan Kelara merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbia di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Gowa di sebelah Barat dan Kecamatan Turatea di sebelah Selatan. Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja kebanyakan adalah petani. Tanaman yang diusahakan di Kecamatan Kelara meliputi padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, sawi, cabe besar, tomat, terong, kacang panjang dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara awal kepada masyarakat petani yakni Bapak Muh. Dinsar Ketua Kelompok Tani Saribattangta Tolo I di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara mengatakan bahwa “Kendala yang dihadapi kebanyakan karena masih banyak petani yang belum paham terkait ilmu petani. Sedangkan, penyuluhan terkait pertanian

yang seharusnya dilakukan tidak dirasakan oleh semua petani. Selain itu, proses produksi yang belum maksimal karena ketidakmampuan petani yang membutuhkan pupuk, pestisida dan alat pertanian tapi memiliki harga tinggi.” Penulis juga mendapatkan informasi bahwa kekeringan menjadi masalah utama dalam terjadinya gagal panen di Kecamatan Kelara. Lalu, dari pengamatan awal penulis serta didukungnya berbagai informasi, strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam wujud Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dihadapkan pada berbagai fenomena, antara lain kurangnya andil dan perhatian pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan harga komoditas pertanian yang seringkali tidak menguntungkan petani, masih rendahnya sosialisasi pendidikan dan pelatihan teknis yang diperoleh oleh petani. Di sisi lain, penyuluhan dan pendampingan petani juga masih jarang dilakukan serta kurangnya perhatian pemerintah dalam penguatan kelembagaan petani.

Mengamati kondisi Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto seperti yang dijelaskan di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang strategi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani

dengan mengangkat judul penelitian yakni “**Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kelara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Petani di Kecamatan Kelara?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Petani guna meningkatkan kesejahteraan Petani di Kecamatan Kelara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Petani di Kecamatan Kelara
2. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Petani guna meningkatkan kesejahteraan Petani di Kecamatan Kelara

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu pemerintahan terkait dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kelara

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto mengenai strategi Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat tani terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang mendatang.

3. Manfaat Metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan tentang strategi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Kecamatan Kelara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan untuk memperjelas dan menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat mempermudah memahami realitas yang ada. Konsep dan teori-teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang terjadi bersumber dari buku atau referensi lainnya. Menurut Gandas adalah sebuah bab khusus yang membahas kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan dengan tujuan menghasilkan hipotesis atau menguji kebenaran teori dalam penelitian tersebut.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Konsep Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani "Stategos", juga dikenal sebagai "strategis", dapat diartikan sebagai "jalan". Strategi adalah rencana yang mencakup pendekatan menyeluruh dan terpadu yang dapat dijadikan pedoman untuk bekerja, berjuang dan bertindak untuk mencapai kompetensi, sesuai dengan ketentuan. Strategi diartikan sebagai "rencana tindakan yang cermat guna mencapai tujuan tertentu" oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Strategi dipandang

menjadi suatu perencanaan yang matang untuk diterapkan sebelum, selama, serta sesudah penerapan kegiatan.

Husen Umar (2008:38) mengemukakan strategi sebagai perencanaan dengan menggunakan cara yang efektif dengan berlandaskan pada sarana-sarana yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yakni mempertahankan orientasi pada jangka panjang yang jauh untuk masa depan, dengan tujuan sarana interaksi secara efektif yakni sebagai langkah persaingan dalam lingkup sekaligus upaya mengoptimalkan yang diarahkan dalam rangka pencapaian keberlangsungan yang diharapkan.

Puji Hadiyanti (2008:27) menyebutkan bahwa strategi sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dana, kemudian daya dan peralatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan serta sasaran-sasaran yang ditetapkan. Strategi juga merupakan suatu kerangka kerja (*frame work*) yang sekaligus dapat digunakan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan, apalagi yang berkaitan dengan persaingan organisasi atau perusahaan.

2.2 Peran Pemerintah

2.2.1 Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan perannya setiap manusia memiliki sikap atau

tindakan yang berbeda-beda. Menurut Poerwadarminta, (Cahya,2017:22) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.

Menurut Riyadi (Syaron, 2017:2) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara *structural* (norma-norma, harapan, tanggung jawab, tabu dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan

pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu, pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu dan peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas

kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur

yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2011: 61).

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu.

Berikut paling tidak 3 fungsi pemerintah yang harus dijalankan yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan.

1. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini menekankan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Dalam hal ini pemerintah berhak membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan mencakup pelaksanaan tugas negara

dalam melayani warga negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Aparat menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Ditinjau dari konteks implementasi fungsi pemerintah, pelayanan dapat dikategorikan sebagai upaya dalam menyiapkan, menyediakan, atau mengurus kepentingan warga masyarakat.

3. Fungsi Pemberdayaan

Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan prasarana/sarana dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat dan pengembangan sistem informasi.

2.2.2 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah ini merujuk pada Bab I

tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 59 mengamanatkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah

yang dimaksud adalah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati dan untuk daerah kota disebut wali kota. Kemudian Pasal 63 mengamanatkan bahwa Kepala daerah tersebut dibantu oleh wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah yang dimaksud untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65, berikut tugas dari Kepala daerah, yakni:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut wewenang dari kepala daerah, yakni:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas, yakni:

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah provinsi bagi wakil gubernur;

4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional;

- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2.3 Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Perlindungan yang dilakukan kepada masyarakat adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris

yaitu *empowerment*. Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan *empowerment* dalam dua arti yaitu:

- 1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu:
- 2) *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut para ahli, pada intinya diartikan sebagai berikut: “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan”.

Pengertian masyarakat sudah banyak dikemukakan oleh para pakar ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. (John J. Macionis, 1997)). Berdasarkan pengertian-pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu

yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Adam Smith mengemukakan, bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*as among different merchants*), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti. Ahli dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan (1974) memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang ada dengan berporos pada manusia, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan menurut (Chambers, 1995). Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga sisi menurut (Soemodiningrat,2002), yaitu: satu, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Indikator pada sisi ini ialah masyarakat sadar memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Pemberdayaan merupakan cara untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Pada sisi ini, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam memberikan masukan, pembukaan akses ke berbagai peluang agar masyarakat mampu menunjukkan bahwa mereka berdaya. Pemberdayaan bukan hanya ditujukan pada individu atau anggota masyarakat saja, tetapi kelembagaannya juga. Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelembagaan dengan menanamkan keterbukaan, kerja keras dan kerja cerdas, serta kebertanggungjawaban.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam pemberdayaan, pencegahan perlu dilakukan pada masyarakat lemah yang menjadi bertambah lemah. Maka dari itu, perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat lemah menjadi dasar konsep

pemberdayaan masyarakat. Melindungi masyarakat lemah yang dimaksud bukan mengisolasi atau menutup akses masyarakat lemah tersebut, melainkan menjaga masyarakat lemah dikerdilkan oleh masyarakat di atasnya, persaingan antar masyarakat yang tidakimbang, serta eksploitasi masyarakat lemah.

Adapun proses pemberdayaan masyarakat sendiri yakni:

1. Proses penyadaran, yakni tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi
2. Proses pembinaan, yakni tahap dalam proses transformasi pengetahuan, peningkatan kecakapan serta keterampilan. Disini kegiatan masyarakat berupaya belajar tentang pengetahuan serta kecakapan yang baru, sehingga terdapat peningkatan sikapnya dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Proses kemandirian, yakni tahap pendampingan dalam upaya menyiapkan masyarakat sehingga benar-benar mampu dan terampil dalam mengelola kegiatan proses pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal lingkungannya. Kondisi yang menyangkut hubungan faktor internal sangat perlu dan penting yang menjadi salah satu wujud *selforganizing* dalam masyarakat, tetapi dalam hal ini perlu juga upaya memberikan perhatian yang menyangkut faktor eksternal sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat melalui

pendampingan oleh suatu Tim fasilitator profesional dengan berlatar belakang multi disiplin, bahkan saat ini kompetensi pendamping perlu ditunjang oleh sertifikasi kompetensi dari Lembaga sertifikasi resmi. Jadi peran tim ini terus berproses sangat aktif dan sabar dalam mendampingi sasaran sehingga mampu memacu masyarakat yang diberdayakan.

Lalu ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi (Hanna dan Robinson, 1994 dalam Hikmat, 2006: 54)

1. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi *transformative* menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

2.4 Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kehadiran dan keberadaan pemerintah dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekali pun, membutuhkan layanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat sehari-hari erat kaitannya dengan fungsi pemerintah. Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini adalah “tugas yang berkaitan dengan jabatan publik.” Pengertian ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat publik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Peran Pemerintah sangat penting dalam Pemberdayaan masyarakat karena masyarakat di setiap daerah atau di setiap regional atau bahkan di setiap negara itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat yang kesejahteraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka menjalani kehidupannya. Artinya, mereka tidak tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan pihak lain, baik pemerintah, para dermawan maupun komponen masyarakat lainnya. Oleh sebab itu,

pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup layak.

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterkaitannya dengan pembangunan. Bila di suatu daerah atau wilayah pembangunan mengalami hambatan, sehingga perkembangan pembangunan tidak berjalan dengan cepat karena faktor manusia yang ada di daerah atau wilayah yang bersangkutan, maka upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Hal ini akan mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Artinya pada umumnya suatu daerah atau wilayah yang masyarakatnya kurang berdaya, perkembangan pembangunannya akan lambat dan berimplikasi kepada kesejahteraannya akan rendah. Sebaliknya bila di suatu daerah atau wilayah masyarakatnya sudah mampu atau berdaya, maka biasanya berkorelasi dengan cepatnya terjadi perkembangan pembangunan dan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Jadi, tidak bisa dipungkiri, bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pembangunan yang tentunya Pemerintah mempunyai andil atau peran dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah, harus melaksanakan pemberdayaan ke setiap

daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah memberikan persediaan sarana dan prasarana, dan juga persediaan modal untuk proses pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri (Ife, 1995 | 182), yang mencakup pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan Politik (Pranarka dalam Priyono dan Pranarka 1996 :208-219).

Berikut peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan kesehatan dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai. Dalam kaitan itu, Koswara (2001 : 88-89) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat adalah

- a. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan/ penyediaan sarana pendidikan formal yang memadai
- b. Melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program, peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non formal yang memadai
- c. Mendorong atau memotivasi rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye pendidikan.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut Supriatna (2000 : 163), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah

- a. Membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- b. Membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi)

c. Membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

3. Pemberdayaan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembeda-bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna (2000 : 172) adalah

- a. Membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olahraga, kesehatan dan lain-lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga)
- b. Memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya
- c. Melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

4. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berpikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar

terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan. Dalam kaitan ini, Pranarka (dalam Priyono dan Pranarka, 1996 : 221) menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu:

- a. Pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berfikir yang lebih modern (sesuai perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai "agen pembaharu"
- b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakat, kegotong-royongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.

5. Pemberdayaan Politik

Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik, yaitu kesempatan bersama dalam

pengambilan keputusan kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat, kesempatan menyampaikan hak suara, dan lain sebagainya. Menurut Adi (2001 : 183), hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah adalah:

- a. Pemerintah daerah memberikan akses/peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik
- b. Pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Selain itu, Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat indikator yang dikemukakan oleh Arif dalam Adhiwati (2012:9), yakni:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses

pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.

2.5 Petani

Istilah "petani" dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Moore dalam bukunya *Social Origins of Dictatorship and Democracy and Peasant in the Making of the Modern World* (1966:243) mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah.

Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Wolf sebagaimana dikutip Teodor Shanin (1985:49) memberikan istilah peasant untuk petani yang bercirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup (*greenhouse*) di tengah kota atau di dalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga di daerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian.

Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan.

Mosher (1987:198) memberi batasan bahwa petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan. Batasan petani menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah pelaku utama agribisnis, baik agribisnis monokultur maupun polikultur dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan atau komoditas perkebunan.

Ciri-ciri masyarakat petani sebagai berikut:

1. Satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda
2. Petani hidup dari usaha tani, dengan mengolah tanah (lahan)
3. Pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas
4. Petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah 'orang kecil' terhadap masyarakat di atas-desa (Sajogyo, 1999,87).

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara individu yang dapat dilihat dari perilaku yang nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani

di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

2.6 Kerangka Pikir

Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 1016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peran dan strategi tersebut sangat berpengaruh dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tani dimana perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi berupa penyediaan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani dan risiko harga dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani. Sedangkan, pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, produktif, maju dan modern melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dan penguatan kelembagaan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.

Kerangka Pikir Penelitian:

